

POLITIK HUKUM DAN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL

Oleh

Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.

Rudy, S.H., LLM., LLD.

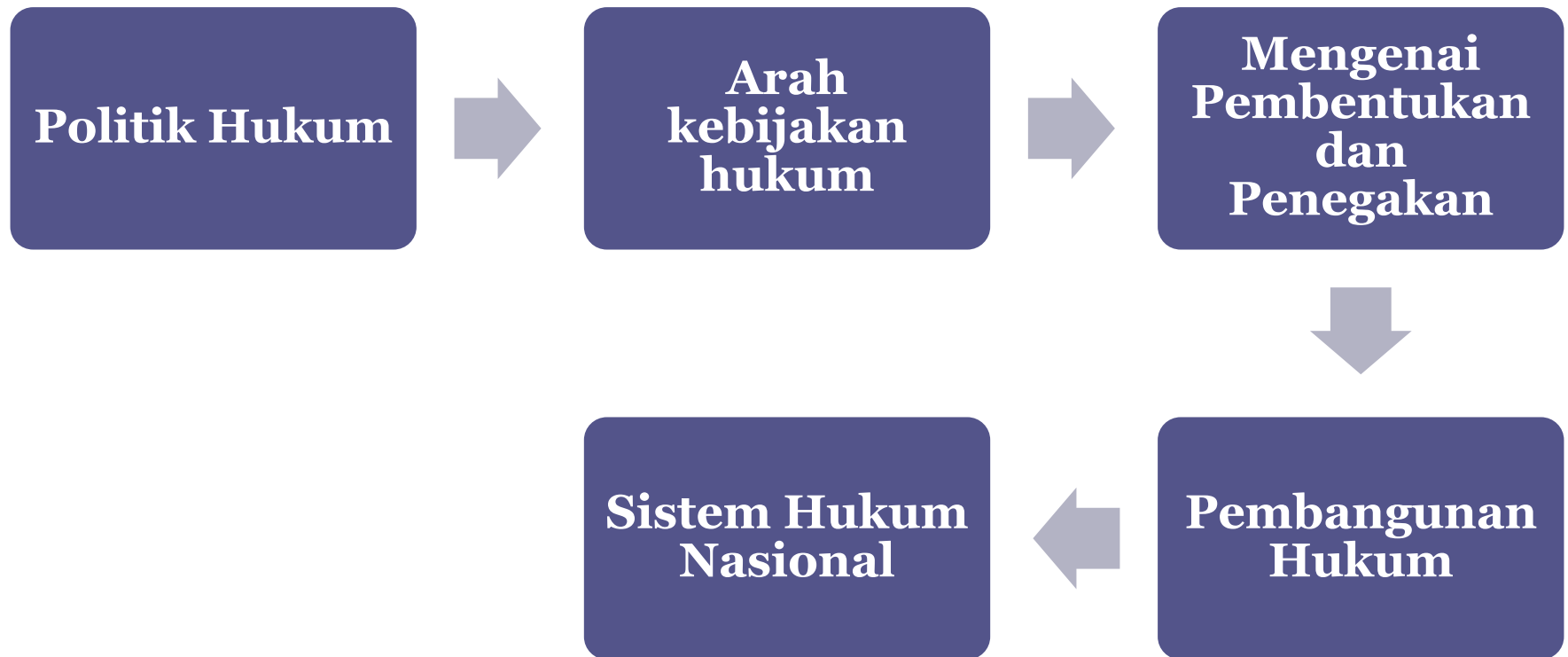
Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D

Dr. Yusnani H, S.H., M.H.

Dr. Chandra Perbawati, S.H., M.H

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2020**

POLITIK HUKUM DAN PEMBANGUNAN HUKUM



PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL

**Perubahan/
Pembaruan Hukum**



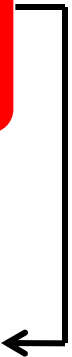
Perubahan/pembaruan/reformasi secara terencana dan berkelanjutan

Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai

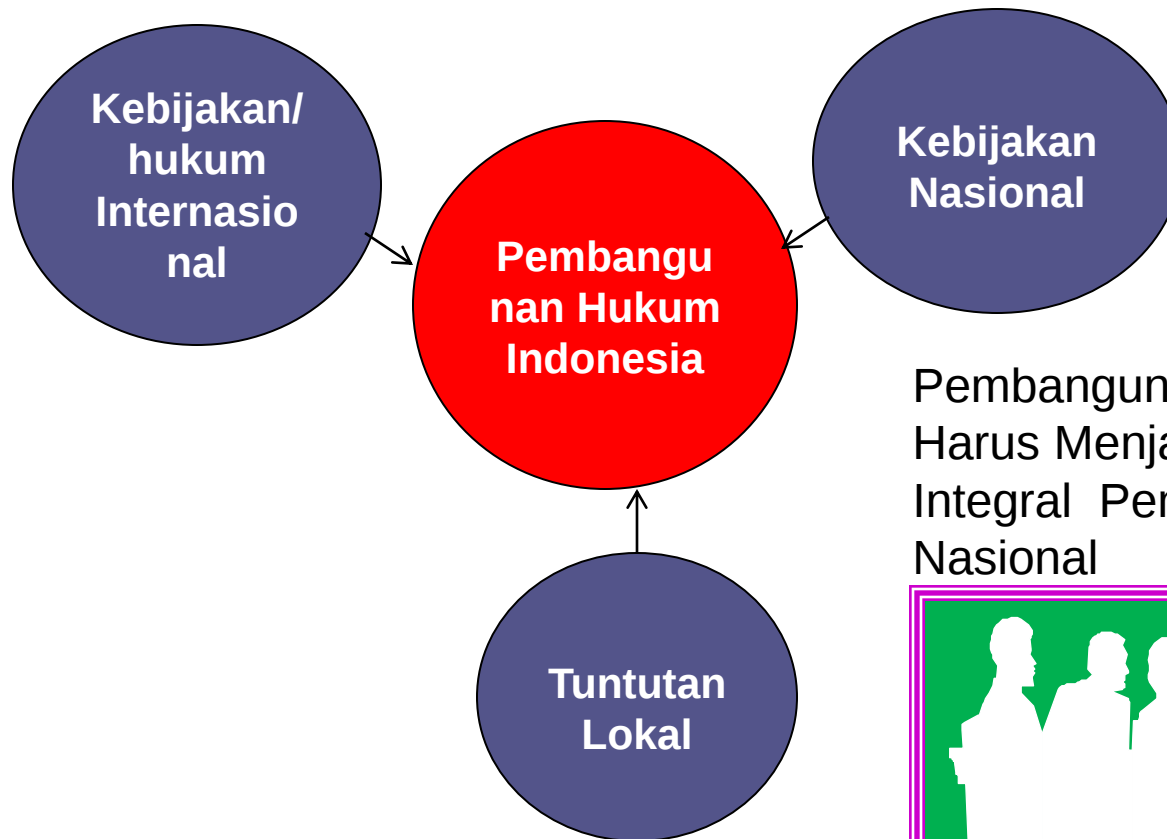


Menciptakan Sistem Hukum Nasional-Indonesia ?

Politik hukum dari SHN tersebut tentu harus sesuai dengan 4 pilar bernegara (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI)



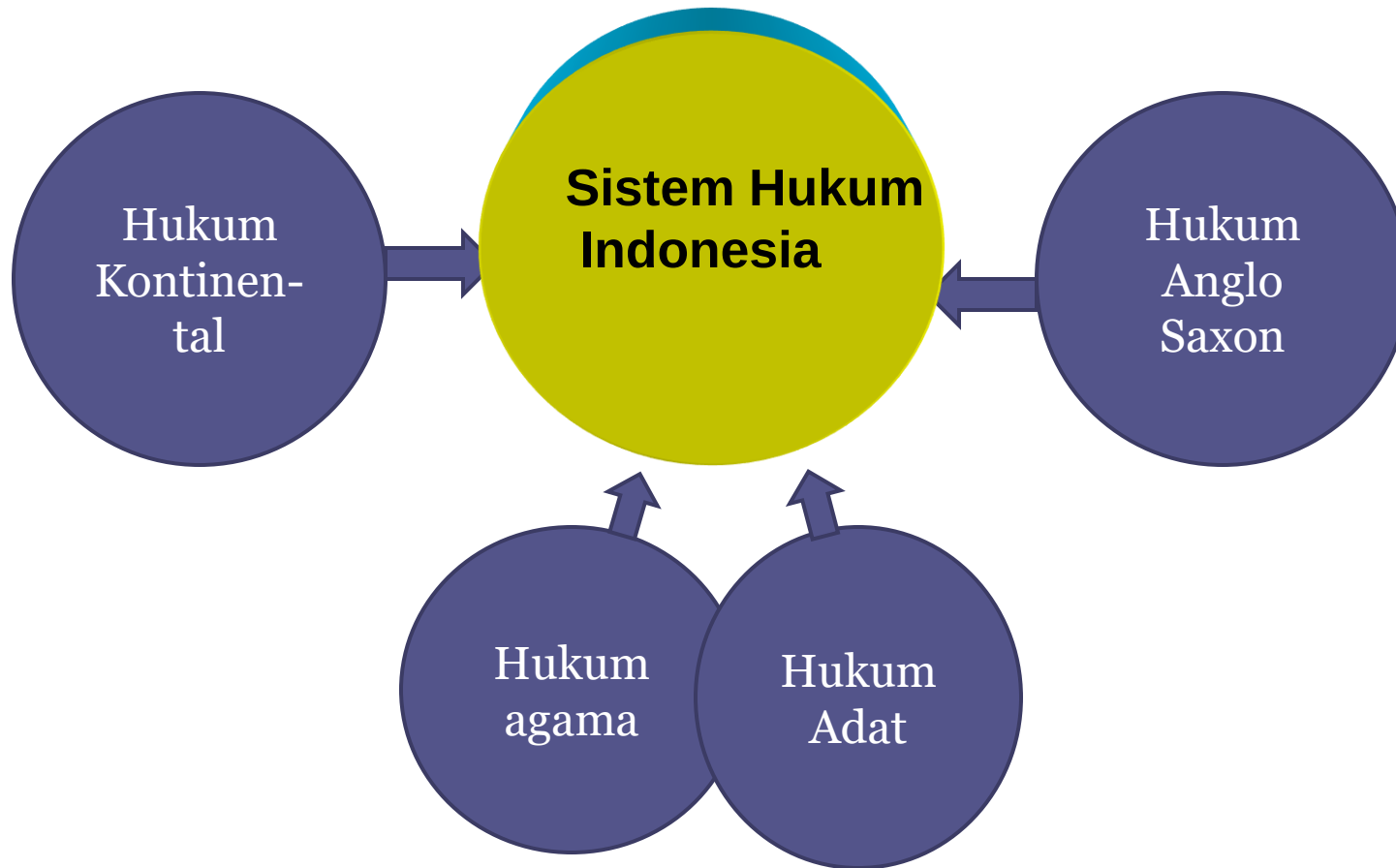
PEMBANGUNAN HUKUM DAN PEMBANGUNAN NASIONAL



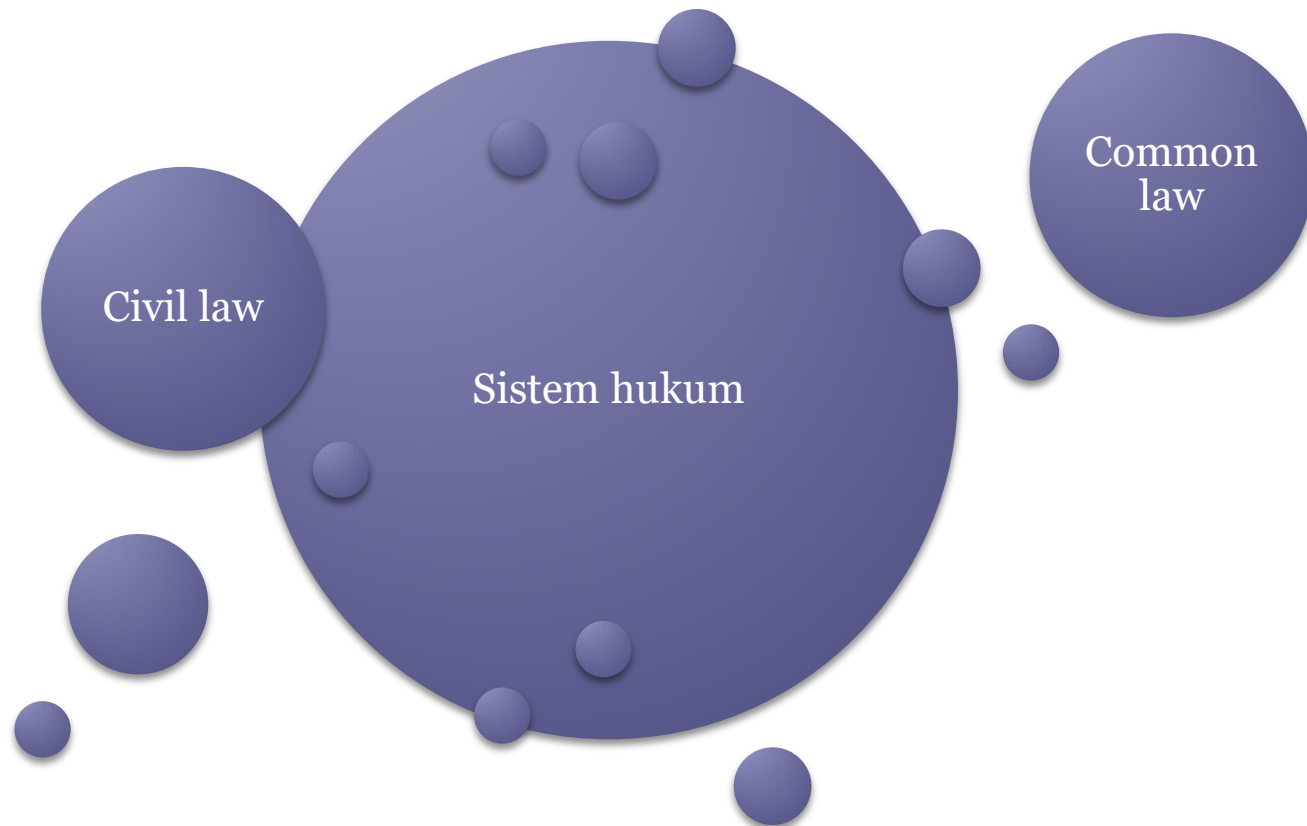
Pembangunan Hukum
Harus Menjadi Bagian
Integral Pembangunan
Nasional



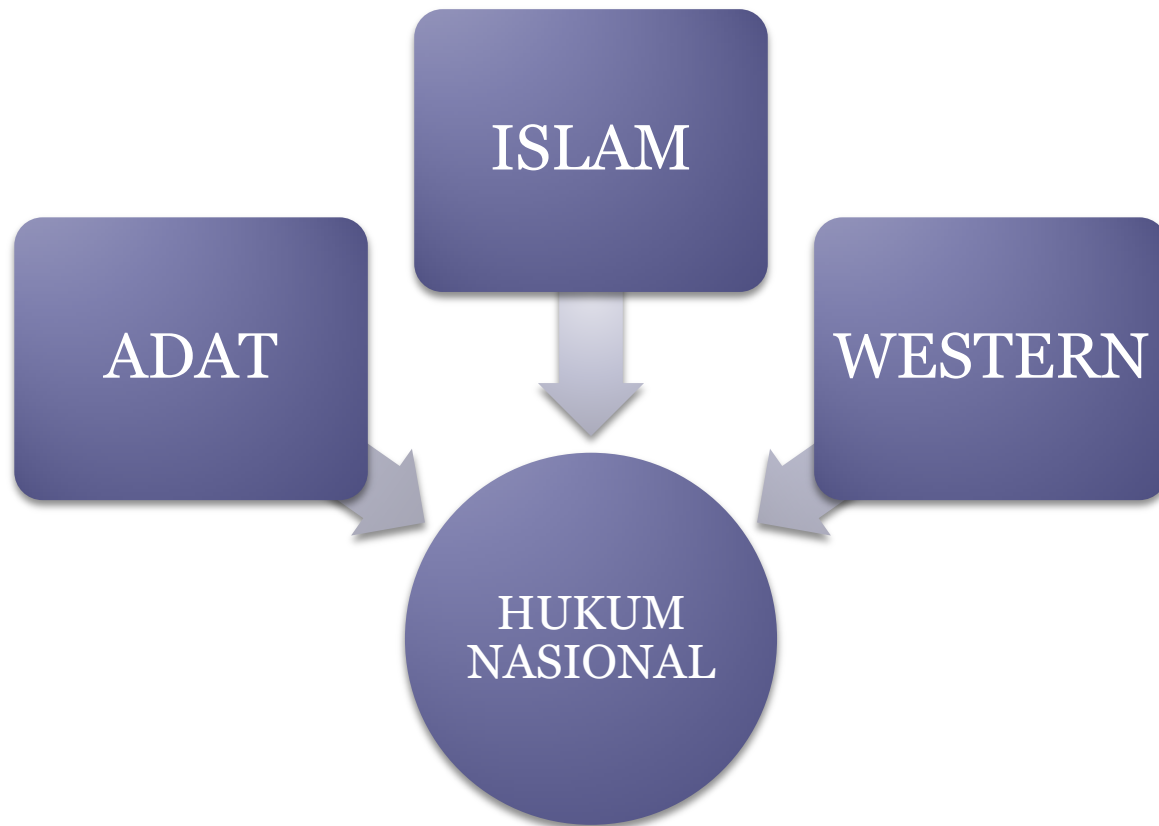
HUKUM YANG BERPENGARUH DALAM PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA



SEMUA BERAWAL DARI ROMA



400 TAHUN PENCARIAN JATI DIRI HUKUM NASIONAL



MASA KOLONIAL

PERIODE VOC

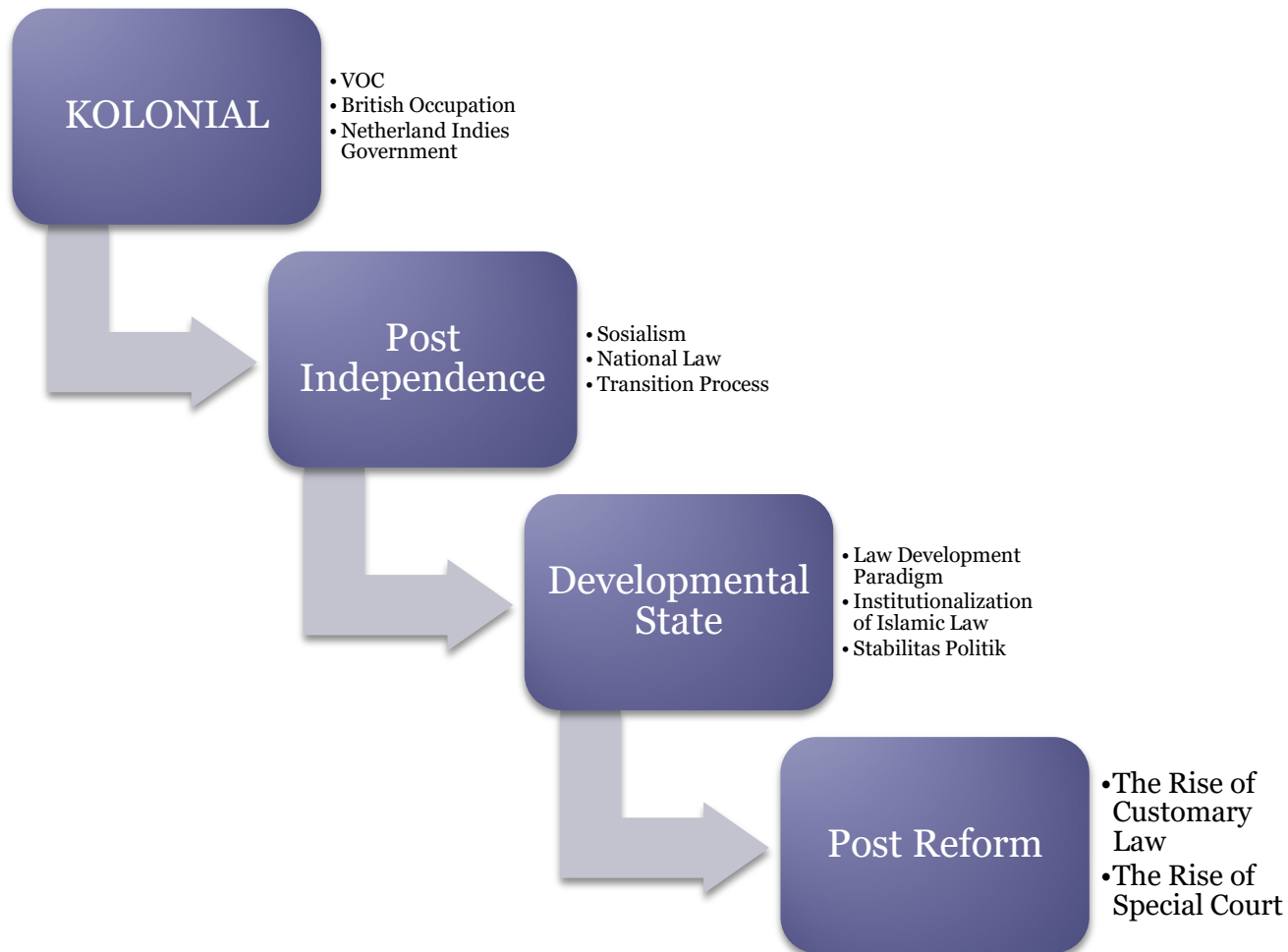


PERIODE BRITISH



PERIODE PEMERINTAHAN
KOLONIAL

Glimpse History of Legal Development in Indonesia



DINAMIKA POLITIK PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL



**PASCA KEMERDEKAAN-ORDE
LAMA**



MASA ORDE BARU



MASA ORDE REFORMASI

POLITIK PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL MASA ORDE LAMA

MENCEGAH KEKOSONGAN HUKUM

- Nasionalisasi atau Transplantasi Hukum Kolonial; Misalnya KUHP, KUH.Pdt, KUHD, Hinder Ordonantie 1926, dll.

PEMBENTUKAN DAN PEMBARUAN HUKUM



Kecuali UUD 1945, pada periode ini belum ada pengaturan secara spesifik yang dapat dijadikan landasan hukum “Politik Pembangunan Hukum Nasional-Indonesia”.

POLITIK PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL MASA ORDE BARU

-  **LANDASAN HUKUM:** Terdapat dalam setiap GBHN: GBHN 1973-GBHN 1998.
-  **Kebijakan pembangunan hukum dalam GBHN 1993 meliputi: (1) Materi Hukum, (2) Aparatur Hukum, dan (3) Sarana Prasarana hukum**
-  **Dalam GBHN 1998 selain ketiga hal tersebut ditambah dengan: (4) Budaya Hukum, dan (5) HAM.**

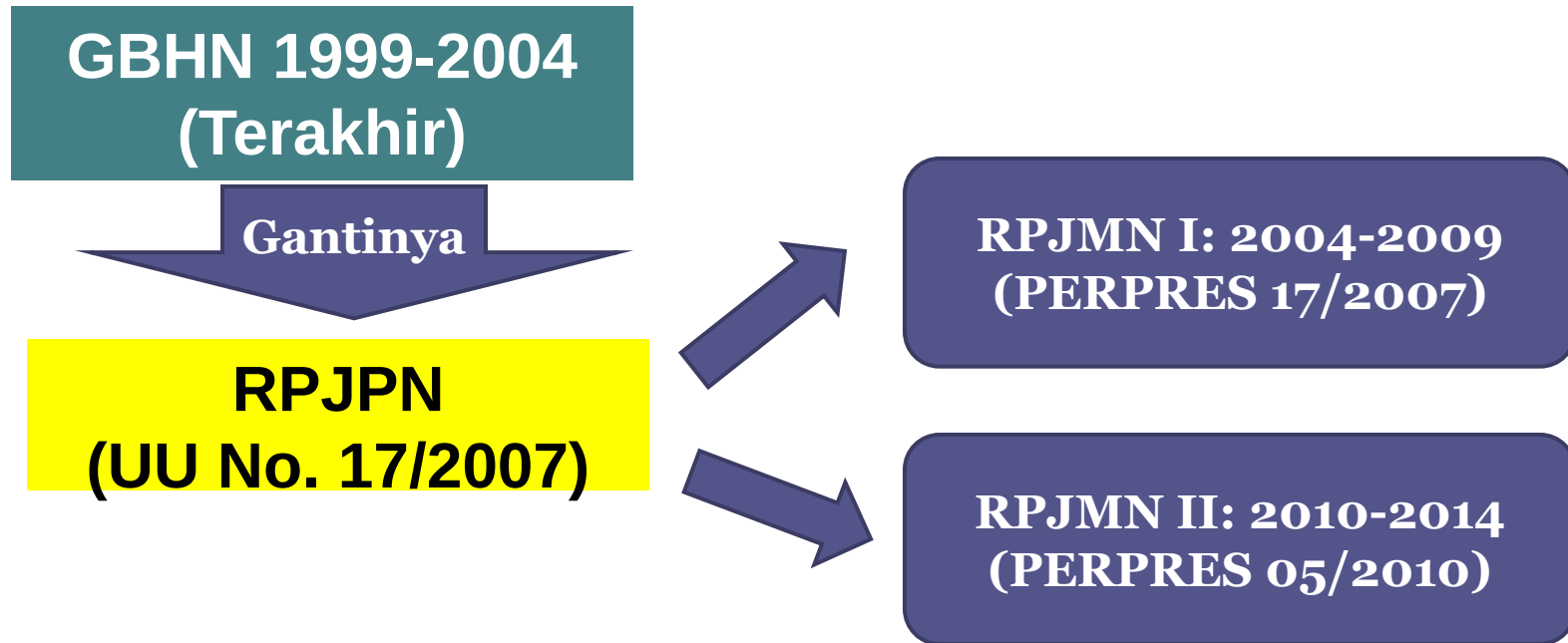
POLITIK PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL ERA REFORMASI

Landasan pertama mengenai hukum di Era Reformasi adalah Ketetapan MPR No. X.MPR/ 1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara



Tujuan reformasi pembangunan di bidang hukum adalah untuk menegakan hukum berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan, HAM menuju terciptanya ketertiban umum dan perbaikan sikap mental.

POLITIK PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL ERA REFORMASI



- ✓ Dalam RPJMN tersebut politik pembangunan hukum nasional semakin tegas.:
 - Dalam RPJM N 2004-2009 dibuat dalam Bab 9: “PEMBENAHAN SISTEM DAN POLTIK HUKUM”
 - Dalam RPJMN 2010-2014 dimuat dalam Bab 7: BIDANG HUKUM DAN APARATUR

PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL BERTUJUAN UNTUK MENCIPTAKAN SISTEM HUKUM NASIONAL



SISTEM HUKUM YANG SEPERTI APA:
SISTEM HUKUM BARAT, ADAT, ISLAM?
TENTU SESUAI **PECULIAR FORM** INDONESIA?



TENTU YANG SESUAI DENGAN *NILAI-NILAI
KEINDONESIAAN*

TERIMA KASIH

Sampai jumpa kembali